

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	5
BAB II	6
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	6
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	6
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	8
BAB III	9
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	9
3.1.1. Pendapatan - LRA	9
3.1.2. Belanja	9
3.1.3. Pendapatan - LO	9
3.1.4. Beban	10
BAB IV	26
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	26
BAB V	29
PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, secara sistematis terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
- BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
- BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
- BAB V : PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2022 melalui APBD Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 8.286.609.784,00 yang terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp 8.228.945.784,00 dan belanja Modal sebesar Rp 57.664.000,00 yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp 8.128.829.953,00 atau sebesar 98,10 %, dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Operasi	8.228.945.784	8.072.297.953	156.647.831	98,10
II	Belanja Modal	57.664.000,00	56.532.000,00	1.132.000,00	98,04

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinpermades Kabupaten Temanggung tahun 2022 total anggaran sejumlah Rp 8.286.609.784,00 terbagi menjadi 5 program, 8 sub kegiatan dan 22 kegiatan, Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Nama Rekening	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.209.353.884	3.128.561.391	97,48
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.996.500	99,83
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	17.619.500	97,89
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.000.000	26.875.700	92,67
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	7.500.000	100,00
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	14.272.220	95,15
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	58.495.400	97,49
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	992.500	99,25
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000	16.482.182	96,95
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.377.800	6.186.000	96,99
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.378.200	341.976.020	98,44
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.000.000	104.585.550	95,08
13	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	40.000.000	39.244.100	98,11
14	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	49.999.900	49.425.550	98,85
15	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	200.000.000	172.701.250	86,35

16	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	300.000.000	278.540.450	92,85
17	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.400.000.000	3.391.098.540	99,74
18	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20.000.000	19.872.100	99,36
19	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50.000.000	49.732.050	99,46
20	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	54.000.000	53.595.600	99,25
21	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	350.000.000	349.077.350	99,74
JUMLAH		8.286.609.784	8.128.829.953	98,10

Secara umum semua program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat terlaksana dan tidak ada kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 80%.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain adanya kegiatan yang masuk di anggaran perubahan, pelaksanaan kegiatan bersamaan di Triwulan IV.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Rincian penjelasan dari masing-masing pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak memiliki pendapatan

3.1.2. Belanja

Jumlah realisasi belanja selama tahun 2022 adalah sebesar Rp 8.128.829.953,00 dari anggaran sebesar Rp 8.286.609.784,00 atau 98,10%. Rekapitulasi Jumlah belanja dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	BELANJA DAERAH	8.286.609.784	8.128.829.953	98,10
51	BELANJA OPERASI	8.228.945.784	8.072.297.953	98,10
5101	Belanja Pegawai	3.210.353.884	3.128.561.391	97,45
5102	Belanja Barang dan Jasa	5.018.591.900	4.943.736.562	98,51
52	BELANJA MODAL	57.664.000	56.532.000	98,04
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.664.000	56.532.000	98,04

3.1.3. Pendapatan - LO

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak memiliki pendapatan sehingga tidak memiliki pendapatan-LO

3.1.4. Beban

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban;
- b. Terjadinya konsumsi aset;
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Jumlah keseluruhan beban pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kode Rek.	Nama Rekening	Jumlah (Rp)
8	BEBAN DAERAH	8.199.027.240,69
81	BEBAN OPERASI	8.199.027.240,69
8101	Beban Pegawai	3.121.954.029,00
810101	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.844.172.819,00
810102	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.277.781.210,00
8102	Beban Barang dan Jasa	4.941.828.368,00
810201	Beban Barang	539.894.495,00
810202	Beban Jasa	4.062.254.373,00
810203	Beban Pemeliharaan	53.176.100,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	251.053.400,00
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	35.450.000,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	135.244.843,69
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	100.762.590,72
810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.436.382,97
810803	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	570.870,00

810806	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	17.475.000,00
	Jumlah Beban	8.199.027.240,69
	Surplus Defisit LO	(8.199.027.240,69)

Beban Operasi

Jumlah Beban Operasi adalah sebesar Rp 8.199.027.240,69 yang merupakan penjumlahan beban pegawai, beban barang/jasa dan Beban Penyusutan dan Amortisasi

a. Beban Pegawai

Beban pegawai pada 31 Desember 2022 merupakan hasil dari Belanja pegawai 2022 ditambah utang pegawai per 31 Desember 2022 dikurangi utang belanja 2021 dikurang beban dibayar dimuka.

Belanja pegawai	=	Rp	3.128.561.391	
Utang belanja pegawai 31 Des 2022	=	Rp	93.342.638,00	+
		Rp	3.221.904.029	
Utang belanja pegawai 2021	=	Rp	99.950.000	
Beban dibayar dimuka 31 Des 2021	=	Rp	0	-
Beban Pegawai		Rp	3.121.954.029	

b. Beban Barang dan Jasa

Beban barang jasa merupakan hasil dari perhitungan belanja barang jasa ditambah utang barang/jasa 2022 ditambah persediaan awal 2022 dikurangi persediaan per 31 Desember 2022 dan utang barang/jasa awal 2022.

Belanja barang/jasa	=	Rp	4.943.736.562	
Utang belanja barang/jasa 2022	=	Rp	25.376.622	
Persediaan awal	=	Rp	2.228.675	
Beban barang modal menjadi pemeliharaan	=	Rp	0	
Beban barang modal menjadi persediaan	=	Rp	0	+
		Rp	4.971.341.859	
Persediaan per 31 Des 2022	=	Rp	1.006.500,00	
Utang barang/jasa 2021	=	Rp	28.506.991	-
Beban Barang dan Jasa		Rp	4.941.828.368	

c. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah penjumlahan dari 4 beban yaitu :

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	=	100.762.590,72	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	=	16.436.382,97	
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	=	570.870,00	
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	=	17.475.000,00	+
Beban Penyusutan dan Amortisasi	=	135.244.843,69	

Surplus/Defisit dari operasi

Surplus/defisit dari kegiatan operasional yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Karena tidak ada pendapatan maka dalam hal ini defisit operasi adalah sebesar – Rp 8.199.027.240,69

ASET

Aset Lancar

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal (Rp)	Akhir (Rp)
11	ASET LANCAR	3.688.175,00	1.006.500,00
1101	Kas dan Setara Kas	1.459.500,00	0,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.425.000,00	0,00
110107	Kas Lainnya	34.500,00	0,00
1112	Persediaan	2.228.675,00	1.006.500,00
111201	Barang Pakai Habis	2.228.675,00	1.006.500,00

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas tersebut di atas adalah sisa UYHD (Uang Yang Harus Disetor) yang belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Tidak ada Kas dan Setara Kas pada akhir tahun 2022

2. Persediaan

Jumlah persediaan barang per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.006.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Nama Rekening	Nilai (Rp)
111201010012	Bahan Lainnya	150.000
111201030001	Alat Tulis Kantor	306.000
111201030002	Kertas dan Cover	490.500
111201030009	Perlengkapan Dinas	60.000
JUMLAH		1.006.500

Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2022 tersaji sebagai berikut :

Kode Rek	Nama Rekening	Awal(Rp)	Akhir (Rp)
13	ASET TETAP	553.773.674,35	495.952.080,66
1302	Peralatan dan Mesin	1.932.963.650,00	1.950.000.650,00
130202	Alat Angkutan	862.290.000,00	862.290.000,00
130205	Alat Kantor dan Rumah Tangga	440.510.150,00	407.477.150,00
130206	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	39.220.000,00	45.050.000,00
130207	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.533.500,00	4.533.500,00
130208	Alat Laboratorium	235.000,00	0,00
130210	Komputer	586.175.000,00	630.650.000,00

1303	Gedung dan Bangunan	616.275.000,00	616.275.000,00
130301	Bangunan Gedung	616.275.000,00	616.275.000,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.059.800,00	12.059.800,00
130404	Jaringan	12.059.800,00	12.059.800,00
1306	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.280.000,00	49.280.000,00
130601	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.280.000,00	49.280.000,00
1307	Akumulasi Penyusutan	(2.056.804.775,65)	(2.131.663.369,34)
130701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.735.255.019,28)	(1.793.106.360,00)
130702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(316.460.106,37)	(332.896.489,34)
130703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(5.089.650,00)	(5.660.520,00)
15	ASET LAINNYA	62.729.000,00	45.254.000,00
1503	Aset Tidak Berwujud	69.900.000,00	69.900.000,00
150301	Aset Tidak Berwujud	69.900.000,00	69.900.000,00
1504	Aset Lain-lain	360.149.500,00	106.949.500,00
150401	Aset Lain-lain	360.149.500,00	106.949.500,00
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.737.500,00)	(26.212.500,00)
150501	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.737.500,00)	(26.212.500,00)

1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(358.583.000,00)	(105.383.000,00)
150601	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(358.583.000,00)	(105.383.000,00)
	JUMLAH ASSET	620.190.849,35	542.212.580,66

Saldo akhir Aset Tetap TA 2022 sebesar Rp 542.212.580,66 yang disajikan di Neraca merupakan hasil penambahan belanja modal tahun 2022 sebesar Rp 56.532.000,00. Dropping Aset Tetap dari Pemda sebesar Rp 4.230.000,00 berupa 1 (satu) unit Scanner, penghapusan Aset Lain-Lain senilai Rp 253.200.000,00 serta reklas dari Aset Tetap menjadi Barang Ekstrakomptabel sebesar Rp 43.725.000,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset Peralatan dan Mesin

Penambahan Nilai Aset peralatan dan mesin sejumlah Rp 60.762.000,00 berasal dari Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp 8.547.000,00, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp 6.600.000,00, belanja Komputer sebesar Rp 41.385.000,00 dan dropping aset dari Pemda berupa Scanner sebesar Rp 4.320.000,00.

- a. Belanja modal tahun 2022 yang menambah Aset Tetap antara lain:

URAIAN	NILAI
Belanja Modal	56.532.000
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.547.000
Belanja modal etalase (B)	5.550.000
Belanja modal sound system (speaker)	2.997.000
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.600.000
Belanja modal kamera	6.600.000
Belanja Komputer	41.385.000
Belanja modal laptop	11.266.500
Belanja modal laptop	12.000.000
Belanja modal printer	3.496.000
Belanja modal PC Desktop (GU)	10.822.500
Belanja modal tablet	3.800.000

- b. Mutasi aset dropping dari Pemda berupa Scanner sebesar Rp 4.320.000,00
- c. Reklas Aset Tetap menjadi Barang Ekstrakomptabel sejumlah Rp 43.725.000,00 berupa reklas Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 41.580.000,00, Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp 770.000,00, Komputer Rp 1.140.000,00 dan Alat Laboratorium sejumlah Rp 235.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek	Klasifikasi Aset	Jumlah
130205	Alat Kantor dan Rumah Tangga	41.580.000
	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	450.000
	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	300.000
	Mesin Hitung Manual	430.000
	Lemari Besi/metal	325.000
	Filing Cabinet Besi	375.000
	Teralis	1.860.000
	Kursi Rapat	9.000.000
	Kursi Rapat	11.700.000
	Kursi Rapat	7.395.000
	Kursi Putar	2.000.000
	Kursi Putar	850.000
	Meja Komputer	350.000
	Mesin Penghisap Debu/vacuum Cleaner	375.000
	Mesin Penghisap Debu/vacuum Cleaner	315.000
	Kipas Angin	1.500.000
	Kipas Angin	385.000
	Kompas Gas (alat Dapur)	225.000
	Tabung Gas	300.000
	Microphone Floor Stand	280.000
	Unit Power Supply	800.000
	Dispenser	215.000
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	300.000
	Meja Tamu Biasa	250.000
	Meja Tamu Biasa	250.000
	Meja Tamu Biasa	250.000
	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	300.000
	Teralis	800.000
130206	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	770.000
	Microphone/wireless Mic	270.000
	Tripod Camera	300.000
	Telephone (pabx)	200.000
130208	Alat Laboratorium	235.000
	Bendera Merah Putih	235.000
130210	Komputer	1.140.000
	Speaker Komputer	285.000
	Speaker Komputer	375.000
	Printer (peralatan Personal Komputer)	480.000

2. Aset Lain-Lain

Penurunan Nilai Aset Lain-Lain disebabkan adanya penghapusan aset lain-lain berupa Software GIS sebesar Rp 253.200.000,00.

Ikhtisar mutasi selama Tahun 2022

Kode	Nama Rekening	Saldo Awal/2021 (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
13	ASET TETAP	553.773.674,35	-57.821.594	495.952.080,66
1302	Peralatan dan Mesin	1.932.963.650,00	17.037.000	1.950.000.650,00
130202	Alat Angkutan	862.290.000,00	-	862.290.000,00
130205	Alat Kantor dan Rumah Tangga	440.510.150,00	-33.033.000	407.477.150,00
130206	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	39.220.000,00	5.830.000	45.050.000,00
130207	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.533.500,00	-	4.533.500,00
130208	Alat Laboratorium	235.000,00	-235.000	0
130210	Komputer	586.175.000,00	44.475.000	630.650.000,00
1303	Gedung dan Bangunan	616.275.000,00	-	616.275.000,00
130301	Bangunan Gedung	616.275.000,00	-	616.275.000,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.059.800,00	-	12.059.800,00
130404	Jaringan	12.059.800,00	-	12.059.800,00
1306	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.280.000,00	-	49.280.000,00
130601	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.280.000,00	-	49.280.000,00
1307	Akumulasi Penyusutan	-2.056.804.775,65	-74.858.594	-2.131.663.369,34
130701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1.735.255.019,28	-57.851.341	-1.793.106.360,00
130702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-316.460.106,37	-16.436.383	-332.896.489,34
130703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-5.089.650,00	-570.870	-5.660.520,00
15	ASET LAINNYA	62.729.000,00	-17.475.000	45.254.000,00
1503	Aset Tidak Berwujud	69.900.000,00	-	69.900.000,00
150301	Aset Tidak Berwujud	69.900.000,00	-	69.900.000,00
1504	Aset Lain-lain	360.149.500,00	253.200.000	106.949.500,00
150401	Aset Lain-lain	360.149.500,00	253.200.000	106.949.500,00

1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-8.737.500,00	-17.475.000	-26.212.500,00
150501	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-8.737.500,00	-17.475.000	-26.212.500,00
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-358.583.000,00	253.200.000	-105.383.000,00
150601	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-358.583.000,00	253.200.000	-105.383.000,00
	JUMLAH ASSET	620.190.849,35	-77.978.269	542.212.580,66

Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 45.254.000,00 terdiri dari saldo aset tidak berwujud, aset lain-lain dan akumulasi penyusutan aset lainnya, dengan rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal (Rp)	Akhir (Rp)
15	ASET LAINNYA	62.729.000,00	45.254.000,00
1503	Aset Tidak Berwujud	69.900.000,00	69.900.000,00
150301	Aset Tidak Berwujud	69.900.000,00	69.900.000,00
1504	Aset Lain-lain	360.149.500,00	106.949.500,00
150401	Aset Lain-lain	360.149.500,00	106.949.500,00
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.737.500,00)	-26.212.500,00
150501	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.737.500,00)	-26.212.500,00
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(358.583.000,00)	-105.383.000,00
150601	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(358.583.000,00)	-105.383.000,00

Kewajiban

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Hutang PFK (Hutang Pada Pihak Ketiga), Hutang Bunga dll.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Nilai kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Nama Rekening	Awal (Rp)	Akhir (Rp)
2	KEWAJIBAN	128.491.491,00	25.376.622,00
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	128.491.491,00	25.376.622,00
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	34.500,00	0,00
210105	Utang PPh Pusat	34.500,00	0,00
210106	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
210109	Utang Pajak Daerah Katering	0,00	0,00
2106	Utang Belanja	128.456.991,00	118.719.260,00

210601	Utang Belanja Pegawai	99.950.000,00	93.342.638,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	28.506.991,00	25.376.622,00
JUMLAH KEWAJIBAN		128.491.491,00	118.719.260,00

Nilai kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp 118.719.260,00 merupakan utang Belanja Barang dan Jasa dan Utang Belanja Pegawai.

a. Utang PFK (Hutang Pada Pihak Ketiga)

Tidak ada hutang Pada Pihak Ketiga (Hutang PFK) per 31 Desember 2022 karena pajak sudah disetor tidak melewati tanggal 31 Desember 2022.

b. Utang Belanja

Kode Rek	Nama Rekening	Awal (Rp)	Akhir (Rp)
2106	Utang Belanja	128.456.991,00	118.719.260,00
210601	Utang Belanja Pegawai	99.950.000,00	93.342.638,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	28.506.991,00	25.376.622,00

Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp 118.719.260,00 terdiri dari Utang Belanja Jasa Kantor sebesar Rp 1.126.622,00, Utang Belanja honor Tenaga Administrasi dan Keamanan bulan Desember sebesar Rp 24.250.000,00 serta Utang Belanja Pegawai sebesar

Rp 93.342.638,00 yang merupakan utang Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember 2022.

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah (Rp)
210601	Utang Belanja Pegawai	93.342.638,00
210601020001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	93.342.638,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	25.376.622,00
210602020026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	13.450.000,00
210602020031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	10.800.000,00
210602020059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	591.018,00
210602020060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	146.200,00
210602020061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	389.404,00

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah. Struktur dan Isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: Ekuitas awal, Ekuitas akhir, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang

langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek	Nama Rekening	Awal (Rp)	Akhir (Rp)
3	EKUITAS	491.699.358,35	423.493.320,66
31	EKUITAS	491.699.358,35	423.493.320,66
3101	Ekuitas	491.699.358,35	495.115.608,35
310101	Ekuitas	491.699.358,35	495.115.608,35
3103	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	0,00	8.127.404.953,00
310301	RK PPKD	0,00	8.127.404.953,00
	JUMLAH EKUITAS	491.699.358,35	423.493.320,66

Jumlah Ekuitas adalah selisih antara aset dan kewajiban yaitu sebesar Rp 423.493.320,66.

Jumlah Aset	=	542.212.580,66	
Jumlah Kewajiban	=	118.719.260,00	+
Ekuitas		<u>423.493.320,66</u>	

Ekuitas untuk dikonsolidasikan adalah rekening RK-PPKD, mutasinya didapat dari seluruh transaksi STS dan SP2D serta Jurnal Memorial yang diperlukan selama 2022 sebesar Rp 8.127.404.953,00 Ekuitas akhir pada tahun 2022 adalah Rp 423.493.320,66

Setor Kas Daerah

Penyetoran sisa UYHD sebesar Rp 32.850.782,00 terdiri dari pengembalian Ganti Uang Persediaan sebesar Rp 13.300.282,00 dan Pengembalian Tambah Uang Persediaan sebesar Rp 19.550.500,00. UYHD disetor pada tanggal 30 Desember 2022.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1 Data Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Temanggung adalah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mendukung tugas-tugas Pemerintah Daerah. Dasar Hukum keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa beralamat di Jalan Suyoto 7A Temanggung.

4.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 - Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- d. Kepala Bidang Pemerintahan Desa

- e. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di Dinpermades antara lain :
 - Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator Administrasi dan Aparatur Pemerintah Desa
 - Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda/Sub Koordinator Keuangan Desa Perencanaan Ahli Muda/Sub Koordinator Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa
 - Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
 - Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator SDA, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa
 - Analis Keuangan Pusat dan Daerah/Sub Koordinator Aset Desa
 - Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa
 - Arsiparis Terampil
 - Pranata Komputer Terampil

4.3 Mutasi Pegawai

Selama tahun 2022 terjadi pergantian/mutasi pejabat dan staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain pergantian Sekretaris Dinas, dan pergantian 3 Kepala Bidang yaitu Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain itu ada 2 orang staf yang promosi menduduki jabatan baru dan 1 orang staf mutasi ke OPD lain.

BAB V PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Laporan Keuangan, keberadaan CaLK ini membantu *stakeholders* untuk memahami laporan keuangan pemerintah daerah. Kewajiban menyajikan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting mengingat beragamnya latar belakang pendidikan para pengguna laporan yang kebanyakan tidak terlalu akrab dengan struktur laporan keuangan. Laporan Keuangan yang sulit dipahami berpotensi menimbulkan berbagai macam salah penafsiran di antara para pembacanya.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung TA 2022 yang disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, dan dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan dapat dikonsolidasi dengan laporan keuangan OPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 2022

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI,MM

NIP. 19700730 199001 2 002

BAB V PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Laporan Keuangan, keberadaan CaLK ini membantu *stakeholders* untuk memahami laporan keuangan pemerintah daerah. Kewajiban menyajikan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting mengingat beragamnya latar belakang pendidikan para pengguna laporan yang kebanyakan tidak terlalu akrab dengan struktur laporan keuangan. Laporan Keuangan yang sulit dipahami berpotensi menimbulkan berbagai macam salah penafsiran di antara para pembacanya.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung TA 2022 yang disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, dan dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan dapat dikonsolidasi dengan laporan keuangan OPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Temanggung,

2022

